

Kurikulum Kepesantrenan dan Isu Radikalisme; Studi Pesantren di Kabupaten Luwu

Oleh:
Kaharuddin
Ratna Umar

Abstark:

Masalah yang melatar belakangi dilakukannya penelitian ini adalah pertama; adanya “opini” bahwa kurikulum kepesantrenan pada pondok-pondok Pesantren “tertentu” terindikasi ada kaitannya dengan isu radikalisme yang berkembang selama ini. Kedua; Kabupaten Luwu termasuk salah satu Daerah Tingkat II di Propinsi Sulawesi Selatan yang memiliki beberapa Pondok Pesantren yang beragam. Hal ini perlu diteliti karena Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam di Indonesia yang bebas dan otonom untuk menyusun dan melaksanakan kurikulum pendidikan di Pesantren bersangkutan. Baik dari segi kurikulum Kepesantrenannya maupun dari segi sistem pembelajaran dan pengelolaannya.

*Tujuan penelitian ini dilakukan; 1. Mengetahui implementasi dan muatan kurikulum kepesantrenan pada Pondok Pesantren di Kabupaten Luwu. 2. Mengetahui **benar-tidaknya** adanya keterkaitan muatan kurikulum kepesantrenan dengan isu-isu radikalisme.*

Hasil dan Implikasi Penelitian: Mengetahui secara dekat muatan kurikulum kepesantrenan dan perkembangan lembaga-lembaga Pondok Pesantren di Kabupaten Luwu. Karena Pesantren sebagai lembaga pendidikan memiliki kurikulum tidak hanya mengacu pada pengertian kurikulum sebagai materi semata, tetapi juga menyangkut keseluruhan pengalaman belajar santri dalam lingkup koordinasi pondok pesantren. Termasuk didalamnya sistem pendidikan dan pengajaran yang berlaku di pesantren, yang memungkinkan perlunya diadakan suatu rekonstruksi sesuai dengan tuntutan masyarakat dan perkembangan zaman dewasa ini. Sehingga keberadaan pondok pesantren dapat berperan dalam pembangunan masyarakat Islam ke-Indonesiaan yang cinta pada tana air NKRI, BHINEKA Tunggal IKA yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Kata Kunci : Kurikulum Kepesantrenan, Radikalisme, Pondok Pesantren.

PENDAHULUAN

Pesantren merupakan basis pendidikan Islam dan pewaris tradisi tertua di Indonesia.¹ Sebagai lembaga pendidikan alternatif yang dikenal terbuka, namun tidak semua masyarakat bisa mengakses pesantren disebabkan hambatan kultural dan psikologis bagi kelompok masyarakat yang berkebutuhan khusus. Sementara animo masyarakat terhadap pesantren sangat tinggi.² Pendidikan pesantren telah setia melayani masyarakat dan telah dirasakan manfaatnya, sejak sebelum Indonesia merdeka hingga sekarang. Pendidikan pesantren pada hakikatnya adalah pendidikan yang dilahirkan dan dikelola oleh masyarakat sehingga keberadaannya memiliki akar dan pijakan yang kuat di tengah-tengah lapisan masyarakat. Pengakuan seperti ini tidak berlebihan mengingat pendidikan pesantren telah mewarnai sejarah pendidikan di negeri ini.³ Seiring dengan

¹Mufidah, Ch. *Pesantren Rakyat*, Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, el Harakah Vol. 14 No. 1. Hal. 115-116.

²*Ibid.*

³Kementerian Agama RI., *Badan Litbang dan Diklat PUSLITBANG Pendidikan Agama dan Keagamaan*, 2016, h. 1.

perkembangannya pendidikan pesantren mengalami perubahan signifikan khususnya dalam penyelenggaraan pendidikan. Menyikapi perubahan tersebut, setidaknya terdapat dua model penyelenggaraan pendidikan pesantren, yaitu sebagian pesantren melakukan adaptasi baik dari aspek kelembagaan, kurikulum, dan pengelolannya, dan juga sebagian pesantren masih tetap menyelenggarakan sistem pendidikan khas pesantren secara mandiri baik kurikulumnya maupun proses pembelajaran dan pendidikannya.⁴

Meskipun secara eksplisit pondok pesantren berkonotasi sebagai lembaga pendidikan Islam tradisional, tidaklah berarti seluruh pesantren tertutup dari inovasi. Bahkan terdapat diantara para peneliti dari Barat mengakui bahwa pesantren telah berhasil menjadi penggerak dalam gejolak sosial, ekonomi, politik dan budaya. Perkembangan pesantren semakin menunjukkan geliat modernisasi setelah kemerdekaan RI yang ditandai dengan bertambahnya jumlah putra-putri kyai lulusan pesantren yang belajar di lembaga-lembaga non agama dan bertambahnya pengajar pesantren yang bukan berpendidikan pesantren.⁵

Secara pedagogis, kurikulum adalah rancangan pendidikan yang memberi kesempatan peserta didik mengembangkan potensi dirinya dalam suasana belajar menyenangkan dan sesuai dengan kemampuan dirinya untuk memiliki kualitas yang diinginkan masyarakat dan bangsanya. Secara yuridis, kurikulum adalah suatu kebijakan publik yang didasarkan kepada dasar filosofis bangsa dan keputusan yuridis di bidang pendidikan.⁶

Dalam kerangka pengembangan kurikulum, istilah pengembangan menunjukkan pada suatu kegiatan yang menghasilkan suatu alat atau cara yang berkaitan dengan pengembangan kurikulum. Kegiatan pengembangan kurikulum mencakup penyusunan kurikulum, pelaksanaan di sekolah-sekolah disertai penilaian yang intensif, evaluasi secara makro maupun mikro, dan penyempurnaan-penyempurnaan yang dilakukan terhadap komponen tertentu dari kurikulum yang didasarkan atas penilaian dan evaluasi kebijakan terhadap pelaksanaan serta isi komponen kurikulum tersebut.⁷

Titik tolak pengembangan kurikulum dapat didasari oleh pembaharuan dalam bidang tertentu. Misalnya, penemuan teori belajar yang baru dan perubahan tuntutan masyarakat terhadap Sekolah. Sehingga kurikulum diharapkan mampu merealisasikan perkembangan tertentu, sebagai dampak kemajuan teknologi informasi, serta globalisasi, tuntutan-tuntutan sejarah masa lalu, perbedaan latar belakang murid, nilai-nilai filosofis masyarakat, agama atau golongan tertentu, dan tuntutan etnis kultural tertentu.⁸

Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam tertua yang berfungsi sebagai salah satu benteng pertahanan umat Islam, pusat dakwah dan pusat pengembangan masyarakat muslim

⁴*Ibid.*

⁵Jacob, *Ibid.*, 1984. Hal. 63.

⁶Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, *Dokumen Kurikulum 2013* (Jakarta; Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, 2012), h. 2

⁷Hendyat Soetopo, dan Wasty Soemanto, *Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum; Sebagai Substansi Problem Administrasi Pendidikan*(Jakarta; Bina Aksara, 1986), h. 45

⁸Oemar Hamalik, *Manajemen Pengembangan Kurikulum*, (Bandung; ROSDA dan UPI, 2008), cet ke-dua,h.

di Indonesia. Istilah pondok pesantren pertama kali dikenal di Jawa, di Aceh dikenal dengan rangkah dan dayah, di Sumatra Barat dikenal dengan surau.⁹

Lemahnya visi dan tujuan pendidikan pesantren merupakan penekanan yang berlebihan terhadap satu aspek disiplin keilmuan tertentu, sehingga mengabaikan aspek keilmuan lainnya yang mana telah mengalami penyempitan orientasi kurikulum. Karena pelajaran agama masih dominan di beberapa lingkungan pesantren, bahkan materinya hanya khusus disajikan dalam bentuk bahasa arab, dan pengetahuan umum dilaksanakan hanya setengah-setengah, sehingga kemampuan santri terbatas dan masih kurang mendapat pengakuan dari sebagian masyarakat.¹⁰

Masalah yang lainnya pun muncul pada beberapa tahun terakhir ini yaitu mengenai adanya isu radikalisme yang seolah-olah terdapat anggapan bahwa paham seperti itu muncul atau diajarkan pada pondok pesantren tertentu, hal tersebut menambah keresahan masyarakat sehingga tidak jarang dari mereka mengurungkan niat untuk menyekolahkan anaknya pada pondok pesantren.

IMPLEMENTASI KURIKULUM KEPESANTRENAN DI LEMBAGA PESANTREN KABUPATEN LUWU

Kabupaten Luwu adalah salah daerah TK.II di Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki 16 Pondok Pesantren. Dari beberapa Pondok Pesantren tersebut memiliki ciri dan tipologi yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Keenam belas Pondok Pesantren tersebut belum semuanya memiliki kurikulum kepesantrenan. Masih memberlakukan sistem Madrasah sebagaimana Madrasah atau Sekolah umum lainnya. Bahkan Pada umumnya Pondok tersebut belum menerapkan kurikulum kepesantrenan. Karena kriteria dan syarat yang ideal sebuah Pondok Pesantren idealnya memiliki Kyai dan tinggal dalam pondok, santri mondok di asrama, pembina tinggal dalam asrama, memiliki Masjid, dan menerapkan kurikulum Kepesantrenan sesuai dengan ciri dan tipologi Pondok Pesantren bersangkutan.

Dari jumlah pondok Pesantren di Kabupaten Luwu, peneliti membagi dalam tiga zonasi yang diwakili masing-masing satu pondok pada setiap zona yang dianggap memiliki kriteria dan lebih diminati oleh masyarakat, yaitu pondok Pesantren Nur El-Haq Komba yang mewakili zona Pertama; yang terdiri dari Kecamatan Larompong Selatan, Larompong, Suli, dan Suli Barat. Zona Kedua: Pondok Pesantren Modern Babus Sa'adah Bajo mewakili Kecamatan Belopa, Kecamatan Bajo, Bajo Barat, Latimojong, dan Kecamatan Kamanre. Zona ketiga, Pondok Pesantren Putri Nurul Jadid Bua, yaitu Kecamatan Ponrang Selatan, Ponrang, Bupon, dan Kecamatan Bua.

Ketiga Pondok Pesantren tersebut yang mewakili zona masing-masing telah menerapkan Kurikulum Kepesantrenan sesuai dengan visi, misi Pondok bersangkutan. Kurikulum Kepesantrenan yang diterapkan Pondok Pesantren di Kabupaten Luwu menurut peneliti selama melakukan penelitian tidak didapatkan adanya indikasi keterkaitan dengan isu-isu atau paham radikalisme.

⁹Hidar Putra Dulay, *Historisitas dan Eksistensi Pesantren, Sekolah dan Madrasah*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001), h. ix.

¹⁰Yasmadi, *Modernisasi Pesantren, Kritik Nur CholisMadjid Terhadap Pendidikan Islam Tradisional*, (Jakarta: Ciputat Press, 2002), h. .78.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

Penelitian ini terdapat beberapa implikasi yang dapat disimpulkan sebagai berikut antara lain yaitu; pertama: Dengan penelitian ini diketahui jumlah Pondok Pesantren, ciri dan tipologi Pondok Pesantren yang ada di Daerah Kabupaten Luwu. Kedua: dilakukannya Penelitian ini dapat diketahui bahwa Penerapan Kurikulum Kepesantrenan pada Pondok Pesantren di Kabupaten Luwu tidak didapatkan adanya keterkaitan dengan isu atau paham radikalisme. Walaupun memang materi Kurikulum Kepesantrenannya berbeda antara satu pondok dengan pondok yang lain, baik dari segi gaya, seni, model, sistem, metode pembinaannya, juga berbeda antara satu dengan yang lain, ada yang agak ketat atau disiplin, ada juga yang agak modern, dan juga ada yang agak salafi. Tetapi kesemuanya mengintegrasikan antara kurikulum Kepesantrenan dengan Kurikulum Madrasah atau sekolah umum lainnya. Sehingga tidak terdapat celah adanya keterkaitan dengan paham atau isu radikalisme terhadap Kurikulum Kepesantrenan pada Pondok Pesantren yang ada di Kabupaten Luwu.

DAFTAR PUSTAKA

Mufidah, Ch. *Pesantren Rakyat*, Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, el Harakah Vol. 14 No. 1.

Kementerian Agama RI., *Badan Litbang dan Diklat PUSLITBANG Pendidikan Agama dan Keagamaan*, 2016

Kemertrian Pendidikan dan Kebudayaan, *Dokumen Kurikulum 2013* (Jakarta; Kemertrian Pendidikan dan Kebudayaan, 2012

Hendyat Soetopo, dan Wasty Soemanto, *Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum; Sebagai Substansi Problem Administrasi Pendidikan* (Jakarta; Bina Aksara, 1986

Oemar Hamalik, *Manajemen Pengembangan Kurikulum*, Cet. II. Bandung; ROSDA dan UPI, 2008.

Hidar Putra Dulay, *Historisitas dan Eksistensi Pesantren, Sekolah dan Madrasah*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001.

Yasmadi, *Modernisasi Pesantren, Kritik Nur CholisMadjid Terhadap Pendidikan Islam Tradisional*. Jakarta: Ciputat Press, 2002.

Amir Mahmud, *Dinamika Pengembangan Kurikulum Pendidikan di Pesantren Rifaiyah(1974-2014)*, Tesis (Yogyakarta: UIN Yokyakarta, 2014.

Sakti Wira Yuda, *Radikalisme Kelompok Islam (Analisis Struktur-Agen terhadap Wacana Radikalisme Kelompok Islam Pasca-Orde Baru)*, Tesis, (Depok, Universitas Indonesia, 2012).

Yasmadi, *Modernisasi Pesantren, Kritik Nur CholisMadjid Terhadap Pendidikan Islam Tradisiona.*, Jakarta: Ciputat Press, 2002.

AbuddinNata, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta: Logos wacana Ilmu, 2001.

AninNurhayati, *Kurikulum Inovasi, Telaah Terhadap Pengembangan Kurikulum Pendidikan Pesantren*, (Yogyakarta: Teras, 2010.

Abdurrahman Wahid, Kurikulum Pesantren dan Penyediaan Lapangan Kerja “Dalam Bunga Rampai Pesantren”, (Jakarta: CV Dharma Bhakti, tt.h.

MujamilQomar, Pesantren : Dari Tarnsformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi, (Jakarta: Erlangga, 2005.

Binti Maunah, M.Pd.I, Tradisi Intelektual Santri. Yoyakarta: Teras, 2009.
NurcholishMadjid, Bilik-bilik Pesantren, Sebuah Potret Perjalanan. Jakarta: Paramadina, 1997

MujamilQomar, Pesantren : Dari Tranformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi.A.S.Hornby, oxford Advenced, Dictionary of current English. UK: Oxford university press,2000.

Nuhrison M. Nuh, Faktor-Faktor Penyebab Munculnya Faham/ Gerakan Islam Radikal diIndonesia (HARMONI Jurnal Multikultural & Multireligius, Vol VIII Juli-September 2009.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008 . 354.

Sartono Kartodirdjo, Ratu Adil. Jakarta: Sinar Harapan, 1985.

A.Rubaidi, Radikalisme Islam, Nahdatul Ulama Masa depan Moderatisme Islam di Indonesia. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2007.

Irwan Masduqi, Deradikalisasi Pendidikan Islam Berbasis Khazanah Pesantren. JurnalPendidikan Islam, No 2 Vol 1, 2012. Rusydi Hasyim, Wawancara, Kantor Kementerian Agama Luwu di Belopo Kabupaten Luwu tanggal 14 Agustus 2017

Fakhruddin, Wawancara, Malela di Luwu, tanggal 23 Agustus 2017.

Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Rosda Karya, 2000, h. 165.

Hadari Nawawi, Penelitian Terapan. Cet. VII; Yogyakarta: Gajah Mada Press, 2015.

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&d. Cet. V; Bandung: Aipabeta, 2014.

Suharismi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik. Cet. XII; Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Nana Sudjana, Penelitian dan Penilaian Pendidikan, Bandung: Sinar Baru, 1998.

Imam Suprayogo, Metodologi Penelitian Sosial Agama,. Cet. I; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001.

Joko Subagyo, Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta, 1991.

S. Nasution, Metode Research(Penelitian Ilmiah),. Cet. VIII; Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 113.

Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, Metodologi Penelitian Sosial. Cet. III; Jakarta: Bumi Aksara, 2009.

J. Suprianto, Metode Riset Aplikasi dalam Pemasaran, Edisi 6, (Jakarta: Fakultas Ekonomi, 1997.

Iskandar, Metodologi Penelitian dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif).

Rusydi Hasyim, Wawancara, tanggal 14 Agustus 2017 di Ruang Kerjanya. Beliau saat ini membidangi Urusan Haji di Kabupaten Luwu. Dan Sebelumnya ia membidangi Kapontren Kabupaten Luwu. .Fakhruddin, Wawancara , melalui Via telpon, tanggal 21 Agustus 2017. Beliau adalah pimpinan Pondok Pesantren Az-Zaitun di Malela Kecamatan Suli kabupaten Luwu.

Abd Najid, Wawancara, di Lumaring tanggal 21 Agustus 2017.Ia adalah Pengurus Yayasan dan Pembina Pondok Pesantren Darul Khaeriyah Tawondu Kecamatan Suli Kabupaten Luwu.

Irfan, Wawancara, Kantor Pondok Pesantren Nur El-Haq Komba Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu, tanggal 01 Agustus 2017.

Haedir Sangaji, Wawancara, Pondok Pesantren Modern Bajo Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu, tanggal 01 Agustus 2017.

Irfan, Wawancara, di Kantor Pondok Pesantren Nur El-Haq Komba Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu, tanggal 01 Oktober 2017.

Khaedir, Wawancara, Pondok Pesantren Modern Babus Sa'adah Bajo Kabupaten Luwu, tanggal 01 Oktober 2017

Nazri, Wawancara, Pondok Pesantren Putri Nurul Jadid Bua, Kecamatan Bua Kabupaten Luwu, tanggal 2017.

Haedir, Pimpinan Pondok Pesantren Modern Babus Sa'adah Bajo. Wawancara, tanggal 01 Oktober 2017.

H. Mualy, Pembina Kampus Pondok Pesantren Putri Nurul Jadid Bua. Wawancara, di ruang kerjanya pada tanggal

Irfan, Guru Kepesantrenan Pondok Pesantren Nur El-Haq Komba, Wawancara, di Kantor Pondok Pesantren Nur El-Haq pada tanggal 01 Oktober 2017.

Haidir Sangaji. Ketua Yayasan sekaligus Pendiri dan Pembina Yayasan Pondok Pesantren Modern Babus Sa'adah Bajo, Wawancara, di Pondok Pesantren Modern Baus Sa'adah Bajo pada hari Ahad tanggal 14 Agustus 2017.

Hj. A. Nur (Opu), Ketua Yayasan Pondok Pesantren Putri Nurul Jadid ,Wawancara, Sabtu, 21 Agustus 2017.